

**BUKU PANDUAN
KULIAH KERJA NYATA**



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**

Kata Pengantar

Rasa syukur yang dalam kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmad-Nya sehingga buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) STPMD “APMD” Edisi ke 6 ini dapat diterbitkan. Penyusunan dan perbaikan buku panduan ini didasarkan pada hasil Workshop Evaluasi Model-Model KKN STPMD “APMD” yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2016 dan diikuti oleh unsur Pimpinan dan dosen.

Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan KKN bagi penyelenggara KKN dan bagi mahasiswa peserta KKN. Buku ini berisikan tentang latar belakang, pengertian, prinsip-prinsip, tujuan dan sasaran, dasar peraturan perundangan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tugas dan kewajiban, tata tertib dan sanksi dalam keseluruhan panduan penyelenggaraan KKN. Dalam rangka mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam buku ini juga diuraikan beberapa model KKN yang merupakan hasil Workshop Evaluasi Model-Model KKN sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi mahasiswa. Buku ini diharapkan dapat dijadikan panduan yang dapat menyamakan pemahaman dan langkah kerja dalam penyelenggaraan KKN yang selanjutnya dapat memperlancar dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan KKN.

Kami mengucapkan banyak terimakasih atas sumbangan pemikiran dari berbagai pihak sehingga buku panduan KKN ini dapat lebih disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian juga kami mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Tim P3M yang telah bekerja memperbaiki buku panduan ini. Kepada Ketua STPMD ‘APMD” beserta seluruh Wakil Ketua dan rekan-rekan dosen yang telah memberikan kontribusi atas terwujudnya buku ini.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada buku panduan ini, maka demi penyempurnaan dan kemajuan KKN STPMD “APMD” saran dan masukan sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 20 Juli 2016

Hormat kami,

Kepala P3M STPMD “APMD”

Dra. Widati, lic.rer.reg.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	4
C. Model KKN	4
D. Prinsip-Prinsip Dasar	6
E. Dasar Penyelenggaraan	8
F. Tujuan KKN	9
G. Sasaran KKN	9
H. Tema KKN	11
I. Program Kegiatan KKN	13
J. Organisasi Pengelola	14
BAB II PERSIAPAN	21
A. Konsultasi, Koordinasi, dan Publikasi	21
B. Observasi, Penentuan Lokasi dan Penempatan Mahasiswa	22
C. Pengurusan Ijin	23
D. Pendaftaran Peserta	24
E. Pembekalan dan Pelatihan	25
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL KKN	27
A. Penerimaan Mahasiswa KKN ke Lokasi	27
B. Observasi, Penyusunan Program Kerja, Sosialisasi dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja	27
C. Pelaksanaan Program Kerja dan Pelaporan Kegiatan KKN.....	28
D. Pembimbingan dan Pemantauan	29
E. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi	29
BAB IV Evaluasi	31
A. Pelaksanaan Evaluasi	31
B. Bobot Komponen Penilaian	32
C. Beberapa Ketentuan Lain dalam Evaluasi	32

BAB V Tugas dan Kewajiban, Tata Tertib, dan Sanksi..... 34
A. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa 34
B. Tata Tertib Peserta KKN..... 35
C. Sanksi 37
D. Lain-Lain 38

LAMPIRAN 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” (STPMD “APMD”) Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengelola dan mengembangkan keilmuan di bidang Sosial Politik. Sesuai dengan namanya STPMD “APMD” memiliki komitmen untuk mendorong kehidupan masyarakat dan desa untuk berproses secara terus-menerus dalam pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan entitasnya (*continues improvement*) guna mencapai masyarakat yang maju, berkeadilan, berkebudayaan, ramah lingkungan dan sejahtera secara berkelanjutan. Atas dasar komitmen itu, maka bidang-bidang kajian yang memiliki relevansi dengan pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkelanjutan menjadi ciri khas dari pendidikan di STPMD “APMD”. Konsekuensi atas komitmen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan tersebut, maka STPMD “APMD” selalu berupaya untuk membawa seluruh civitas akademika secara aktif mengenali, mendalami dan memahami kehidupan masyarakat dan desa serta mampu menjadi motivator dan fasilitator dalam proses pemberdayaan tersebut. Hal ini diyakini akan menumbuhkan simpati dan empati bagi seluruh civitas akademika terhadap masyarakat dan desa. Khusus bagi mahasiswa, hal ini diharapkan mampu mendatangkan panggilan jiwa, untuk nantinya dapat ikut serta secara langsung dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dan desa melalui karya-karya nyata.

Sebagaimana Perguruan Tinggi lain, STPMD “APMD” mengemban tugas untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas penelitian dan pengabdian Sekolah Tinggi dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Untuk mewujudkan tugas tersebut P3M memiliki Visi, Misi. Visi yang diemban P3M adalah Terwujudnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian yang profesional, dinamis dan kompetitif dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan Misinya adalah: 1). Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan handal dan tangguh dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2). Menghasilkan penelitian dan kajian-kajian akademik dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi tepat guna; 3). Mendeseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi; 4). Mendorong pelaksanaan pengabdian menuju terwujudnya kemandirian masyarakat berbasis pemberdayaan; 5). Menjalinkan kerja sama dengan institusi lain untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan jaringan. Salah satu bentuk implementasi dari pengabdian kepada masyarakat adalah penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa yang menempuh program pendidikan Strata Satu (S-1). KKN tersebut merupakan kegiatan yang bersifat kurikuler, sehingga wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program S-1.

KKN yang telah diselenggarakan oleh STPMD “APMD” sejak tahun 1988 merupakan bagian upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. KKN merupakan salah satu saluran yang efektif sebagai arena pembelajaran riil bagi mahasiswa untuk dapat mengenal dan memahami secara nyata kehidupan masyarakat dan desa serta meningkatkan kreatifitasnya untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan desa. Melalui KKN ini STPMD “APMD” dapat belajar banyak tentang efektifitas sistem pendidikannya yang tercermin dari pengalaman mahasiswa selama melaksanakan KKN. KKN juga dapat digunakan sebagai “batu uji” relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat dan desa.

Dalam seminar nasional tentang KKN yang terselenggara pada tanggal 17-18 November 1972, Direktur Pendidikan Tinggi menyarankan penggunaan istilah “Kuliah Kerja Nyata” yang merupakan gabungan dari istilah “Kuliah Kerja” yaitu kegiatan di lapangan yang dikaitkan dengan suatu disiplin ilmu, dan “Kerja Nyata” yang berarti kegiatan praktis untuk kepentingan masyarakat.^{*)} Dengan demikian, KKN merupakan darma pengabdian kepada masyarakat dan menjadi bagian integral dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diemban oleh STPMD “APMD”. Artinya, KKN tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan darma pendidikan/pengajaran dan darma penelitian. Untuk mengimplementasikan darma tersebut STPMD “APMD” mengembangkan beberapa model KKN yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengembangan akademik Sekolah Tinggi. Beberapa model KKN yang telah dilaksanakan meliputi KKN Reguler, KKN Mandiri, KKN khusus, KKN Tematik, dan KKN

^{*)} Cuplikan makalah Prof. DR. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, LLM; Menggali Dasar-Dasar Pemberdayaan Masyarakat Melalui KKN; makalah pada Diskusi Forum LPM-LSM DIY di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2003.

Tanggap Bencana. Melalui Workshop Evaluasi Model-model KKN STPMD “APMD” tahun 2016 menghasilkan perubahan dan perbaikan penyelenggaraan KKN. Perubahan dan perbaikan penyelenggaraan KKN itu berkaitan baik terhadap model-model KKN maupun implementasi dari model-model tersebut. Dari hasil workshop tersebut disepakati untuk mengembangkan model KKN Reguler, mengintegrasikan KKN Mandiri kedalam KKN Tematik, dan muncul model KKN Kerja Sama. Dengan perubahan dan perbaikan tersebut diharapkan KKN menjadi lebih efektif dalam mengintegrasikan darma pengabdian, pengajaran dan penelitian.

Beberapa tahun terakhir telah muncul pendapat dari banyak kalangan, bahwa KKN cenderung bersifat kegiatan “sinter klas”, bias pembangunan fisik, pemborosan, kegiatan sia-sia, membebani masyarakat, dan sebagainya. Pendapat-pendapat tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa KKN selama ini kurang memberdayakan masyarakat melainkan justru memperkuat ketergantungan masyarakat (khususnya masyarakat desa). Berdasarkan pengalaman selama menyelenggarakan KKN, STPMD “APMD” (dan perguruan tinggi pada umumnya) dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan. Dari hasil diskusi di berbagai forum, dapat disimpulkan bahwa penyebab kelemahan itu antara lain karena program kegiatan KKN masih cenderung bersifat “*top down*” dan jenis kegiatannya “itu-itu saja” (*monoton*). Artinya, program kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dibuat “di belakang meja”, tidak partisipatif, dan bias pembangunan fisik seperti, program plangisasi, neonisasi, pengecatan gapura dan lain-lain. Dalam hal ini mahasiswa telah mengambil alih peran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Akibatnya, masyarakat tidak merasa ikut memiliki program kegiatan KKN tersebut, sehingga mahasiswa cenderung bekerja sendiri, sedangkan masyarakat lebih banyak mengambil peran sebagai penonton. Kelemahan lainnya yaitu pada penyusunan program kerja KKN yang kurang visioner, seakan hanya untuk memenuhi target waktu, sehingga orientasinya hanya bertujuan untuk memperoleh nilai yang baik.

Meski masih ada kelemahan yang seringkali ditemui, ternyata KKN yang diselenggarakan STPMD “APMD” juga memiliki keunggulan. Diakui oleh masyarakat di desa-desa yang pernah dijadikan lokasi KKN bahwa mahasiswa STPMD “APMD” memiliki keunggulan dalam berinteraksi sosial/berbaur, dan dalam melakukan pendekatan sosial, dengan masyarakat setempat. Belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada, maka saat ini dan ke depan pihak pengelola

bersama mahasiswa STPMD “APMD” harus memiliki tekad yang sama untuk melakukan reorientasi dan revitalisasi KKN, yang relevan dengan visi dan misi STPMD “APMD” yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa artinya masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan masyarakat dan desanya.

B. Pengertian

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan kurikuler yang memadukan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas dasar pengertian tersebut maka, penyelenggaraan KKN merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan yang diselenggarakan di STPMD “APMD” Yogyakarta. KKN sebagai kegiatan kurikuler mengandung arti bahwa KKN menjadi bagian dari kurikulum. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di lingkungan STPMD “APMD” Yogyakarta, KKN wajib ditempuh oleh mahasiswa jenjang Strata-1 yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Secara substantif, KKN merupakan media belajar khususnya bagi mahasiswa untuk mempertemukan antara dunia teoritik yang didalami di kampus dengan dunia empirik yang dialami masyarakat di luar kampus. Secara akademik (kurikuler) sesuai dengan sebutan “Kuliah” maka, KKN termasuk kegiatan akademik yang diberi bobot sks sehingga mahasiswa yang melaksanakan KKN diberi nilai akademik yang didasarkan atas suatu sistem evaluasi.

Dengan demikian, mahasiswa dalam menjalankan kegiatan KKN harus berinteraksi dan berbaur, belajar bersama dengan masyarakat, serta diharapkan mahasiswa dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran alternatif guna mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih dinamis dan berkelanjutan serta mendukung akselerasi pembangunan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa, KKN merupakan kegiatan akademik yang bersifat kurikuler dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Model KKN

STPMD “APMD” Yogyakarta menyelenggarakan 5 model KKN, yaitu: KKN Reguler, KKN Khusus, KKN Tematik, KKN Tanggap Bencana, dan KKN Kerja Sama.

1. **KKN Reguler** merupakan KKN yang diselenggarakan secara terjadwal satu kali dalam satu tahun. Jadwal waktu pelaksanaan dan lokasi KKN ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STPMD “APMD” Yogyakarta. Lama waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi 50 hari efektif. Peserta KKN dibagi dalam kelompok-kelompok, dan setiap kelompok ditempatkan dan menginap dalam satu pedukuhan/dusun yang telah ditetapkan.
2. **KKN Khusus** adalah KKN yang diselenggarakan khusus untuk mahasiswa yang bekerja. KKN Khusus dapat diselenggarakan setiap semester. Sebagaimana dalam KKN Reguler, mahasiswa peserta KKN dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok menempati satu pedukuhan/dusun. Jadwal waktu pelaksanaan ditentukan oleh P3M. Pemilihan lokasi dan semua urusan administratif diupayakan oleh mahasiswa sendiri. Program kegiatan disusun oleh mahasiswa dibawah bimbingan DPL. Mahasiswa diwajibkan melakukan kegiatan di lokasi setiap 2 hari dalam 1 minggu yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Mahasiswa juga dapat melaksanakan kegiatan pada hari lain sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Waktu kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan.
3. **KKN Tematik** adalah model KKN dengan mengusung tema tertentu dan dilakukan secara berkelompok 3 - 5 orang. Pelaksanaan KKN tematik dalam bentuk pendampingan terhadap kelompok masyarakat. Program kerja yang dilaksanakan berdasarkan tema-tema khusus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. P3M melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan KKN Tematik. Tema-tema KKN misalnya Pemberantasan Buta Huruf, Pengentasan Kemiskinan, Pendampingan Masyarakat Pesisir, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Penguatan Kelembagaan. Di samping itu program kerja perlu memperhatikan konsentrasi dan minat keilmuan mahasiswa. Pemilihan lokasi, program kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan dapat direncanakan P3M. KKN tematik bisa dilakukan berdasarkan atas kepentingan Sekolah Tinggi maupun Program Studi. Lama Waktu melaksanakan kegiatan di lokasi KKN minimal 180 jam dalam rentang waktu 40 – 60 hari.
4. **KKN Tanggap Bencana** adalah model KKN untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang peduli terhadap kejadian bencana alam. Pelaksanaan KKN Tanggap Bencana harus terkoordinasi dengan salah satu organisasi/institusi penyelenggara tanggap bencana (Instansi Pemerintah, LSM,

Organisasi Sosial atau Organisasi Politik). Pemilihan lokasi, program kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan dapat direncanakan sendiri oleh mahasiswa dengan persetujuan organisasi tersebut. Mahasiswa diwajibkan membuat laporan yang disetujui oleh organisasi/istitusi penyelenggara tanggap bencana dan wajib mengikuti ujian laporan yang dijadwalkan oleh P3M.

- 5. KKN Kerja Sama** KKN Kerja Sama ini merupakan model KKN berdasarkan kerja sama antara STPMD “APMD” dengan Pemerintah Daerah atau institusi lain. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau Institusi lain diselenggarakan oleh Pimpinan STPMD “APMD” melalui MoU. P3M mengelola dan merancang pelaksanaan KKN Kerja Sama tersebut. Konsekuensi program, pembiayaan dan prosedur pelaksanaannya perlu dibahas lebih lanjut oleh Pimpinan STPMD “APMD”, P3M, dan Pemerintah Daerah atau institusi lain pada saat dilakukan perjanjian kerja sama.

D.Prinsip-Prinsip Dasar

Dalam rangka mencapai tujuan KKN, perlu dikembangkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan KKN agar dapat memberikan kemanfaatan optimal baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi maupun masyarakat. Prinsip-prinsip dasar itu meliputi:

1. KKN harus berpijak pada semangat pemberdayaan masyarakat.

Prinsip ini mengandung makna bahwa KKN merupakan salah satu arena bagi STPMD “APMD” untuk membangun komitmen sosial yang otentik dan bermakna bagi pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, KKN diselenggarakan atas dasar semangat untuk mengakselerasi pembangunan masyarakat desa dengan:

- a) Belajar bersama antara STPMD “APMD” sebagai institusi pendidikan tinggi, dosen, mahasiswa dan masyarakat desa.
- b) Mendorong pengembangan kehidupan masyarakat desa yang dinamis dan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).
- c) Mendorong masyarakat desa untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
- d) Mendorong kesadaran kritis masyarakat desa untuk menemukan masalah-masalah sosial yang dihadapi sehari-hari dan menemukan solusi pemecahannya (*problem solving*).

- e) Mendorong kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan publik dan ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik di desanya.
- f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik di desa.
- g) Mendorong peningkatan kemampuan masyarakat desa untuk melakukan pemanfaatan dan pengendalian terhadap lingkungan dan sumberdaya yang mempengaruhi kehidupannya.
- h) Memotivasi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga demi tercapainya kesejahteraan.

Atas dasar semangat tersebut, maka pelaksanaan KKN tidak mengambil alih peran masyarakat. KKN bukan untuk menciptakan ketergantungan masyarakat pada pihak eksternal, melainkan untuk mendorong menguatnya kemandirian masyarakat desa.

2. KKN merupakan arena untuk membawa STPMD “APMD” lebih dekat dengan masyarakat desa.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, STPMD “APMD” tetap pada komitmennya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan beserta bidang-bidang kajian yang menitikberatkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Komitmen inilah yang kemudian menjadi pola ilmiah pokok yang dikembangkan di kampus “Pembangunan” ini. KKN merupakan arena untuk saling mengenal lebih dekat dan nyata antara STPMD “APMD” dengan masyarakat desa. Oleh karena itu peserta KKN selain mengaktualisasikan program kerjanya, juga untuk menjalin tali silaturahmi kepada rumah tangga-rumah tangga di lokasi KKN. Dengan demikian keberadaan STPMD “APMD” dapat lebih dikenal oleh masyarakat desa.

3. KKN merupakan arena pembelajaran bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas intelektual, organisasi, dan kepemimpinannya.

Pembelajaran ini mencakup:

- a) Memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat desa.
- b) Menghadapkan mahasiswa pada realitas sosial sehingga mampu menumbuhkan kepekaan sosial dan kepekaan terhadap lokalitas (*sense of locality*) masyarakat desa.

- c) Memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi, bekerjasama, bertanggungjawab dan membangun solidaritas.
- d) Memberi ruang bagi mahasiswa untuk membangun keterampilan komunikasi, fasilitasi dan mengorganisasi masyarakat.
- e) Memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi intelektualnya dalam mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat serta menawarkan solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

4. KKN sebagai bentuk darma pengabdian kepada masyarakat dipadukan dengan darma pendidikan dan penelitian.

Selain sebagai kegiatan pengabdian, KKN juga merupakan kesempatan untuk menghimpun data dari cerita-cerita lokal, pengetahuan lokal (*local knowledge*), budaya lokal dan ketrampilan lokal, yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Melalui kegiatan ini mahasiswa sangat berpeluang menemukan isu-isu strategis yang dapat menjadi sebuah temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian/kajian, pengayaan pengalaman empiris pribadi, maupun sebagai bahan masukan untuk penyegaran/penyempurnaan bahan pengajaran di kampus. Dengan demikian akan memperkaya khazanah penelitian dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat desa.

E. Dasar Penyelenggaraan

KKN sebagai salah satu unsur dari kurikulum wajib di STPMD “APMD” Yogyakarta diselenggarakan dan ditetapkan atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Statuta STPMD “APMD” Yogyakarta;
7. Surat Keputusan Ketua No. 005/I/KPTS-K/2003 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata.

F. Tujuan KKN

1. Menghasilkan lulusan (sarjana) yang mampu menghayati kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, dan mampu memecahkan masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner.
2. Membawa STPMD “APMD” Yogyakarta lebih dekat dengan masyarakat desa melalui peningkatan intensitas kurikulum dan proses belajar-mengajar agar lebih relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
3. Membantu masyarakat desa untuk mengembangkan kemandirian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkelanjutan.
4. Membantu Pemerintah dalam upaya mengembangkan masyarakat desa untuk mencapai keadaan hidup yang sejahtera, adil, dan beradab.
5. Untuk mengembangkan kerjasama antara STPMD “APMD” dengan lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, LSM dan lain-lainnya.
6. Menanamkan jiwa kecintaan kepada masyarakat desa, dengan cara berintegrasi, dan tinggal bersama, sehingga mampu menghayati kehidupan masyarakat desa.
7. Menumbuhkan semangat membangun dan menjadi pelopor pembaharuan desa melalui akselerasi pembangunan di desa.

G. Sasaran KKN

Penyelenggaraan KKN diarahkan pada 3 sasaran, yaitu: 1).Pengembangan kepribadian mahasiswa (*student's personality development*); 2). Pengembangan kelembagaan (*institutional development*) STPMD “APMD”; 3). Pengembangan masyarakat desa (*rural community development*). Tiga sasaran tersebut sekaligus menunjukkan ada 3 subyek utama yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN, yaitu: 1). Mahasiswa; 2). Perguruan tinggi (STPMD “APMD”); 3). Masyarakat.

1. Mahasiswa

Fokus utama KKN adalah pada aspek mental para mahasiswa yang berkaitan dengan pengabdianya kepada bangsa dan negara sebagai perwujudan cinta Tanah Air. Apabila mahasiswa menganggap diri sebagai pembela rakyat, maka ia harus memahami aspirasi masyarakat dengan cara tinggal di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Meski disadari bahwa KKN dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup pendek, namun hal

tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat desa. Harapan lebih jauh adalah ketika kelak mahasiswa menjadi pemimpin tidak lupa atau kehilangan kiblatnya sebagai pembela kepentingan rakyat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang ditempuh melalui:

- a. Mengenalkan kepada mahasiswa tentang kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan masyarakat desa.
- b. Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang:
 - 1) Cara berfikir dan cara bekerja secara interdisipliner dan lintas sektor
 - 2) Kegunaan hasil pendidikannya bagi pengembangan masyarakat desa
 - 3) Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kehidupannya
- c. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa untuk melaksanakan setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa secara pragmatis dan ilmiah.
- d. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pembangunan dengan memberdayakan masyarakat desa.
- e. Mendorong mahasiswa untuk menjadi seorang *fasilitator*, *motivator*, *inovator*, dan *problem solver*.
- f. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan yang tangguh dalam memberdayakan masyarakat desa. Di samping itu dalam diri mahasiswa diharapkan terbentuk sikap dan rasa cinta serta tanggungjawab terhadap kemajuan masyarakat pedesaan.

2. Perguruan Tinggi (STPMD “APMD”)

Secara kelembagaan pelaksanaan KKN akan bermanfaat untuk melihat relevansi pendidikan yang diselenggarakan STPMD “APMD” dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa selama mengikuti KKN memperoleh pengalaman dalam pemahaman dan pengetahuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat. Pengalaman ini dapat dipakai sebagai refleksi terhadap kurikulum dan proses pembelajaran di kampus. Mahasiswa diharapkan menyampaikan pengalaman ini sebagai isu-isu kekinian, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan pembelajaran. Dengan demikian tenaga pengajar memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai

contoh dalam proses belajar-mengajar. Selanjutnya pengalaman mahasiswa dan dosen tersebut akan menjadi bahan masukan bagi STPMD “APMD” dalam meningkatkan relevansi kurikulum dan proses belajar-mengajar dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Di samping perbaikan kurikulum dan proses belajar-mengajar, STPMD “APMD” juga dapat lebih mengembangkan kerjasama dengan instansi-instansi, dinas-dinas, departemen-departemen, dan lembaga-lembaga lain dalam upaya memberdayakan masyarakat desa.

3. Masyarakat Desa

Dengan adanya KKN masyarakat akan memperoleh kemanfaatan yang berharga bagi pengembangan kehidupannya. Kemanfaatan tersebut antara lain:

- a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk bersama-sama merencanakan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan.
- b. Cara berpikir, bersikap dan bertindak akan meningkat sehingga tercipta keadaan yang lebih kondusif untuk mengembangkan kehidupannya secara berkelanjutan.
- c. Terbentuknya kader pembangunan di dalam masyarakat sehingga lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Masyarakat dapat mengenal berbagai karakter dan budaya lain di luar komunitasnya, sehingga memperkaya wacana kebudayaan nasional.
- e. Mandiri tidak tergantung pemberian bantuan dari pihak lain.

H.Tema KKN

Sesuai dengan prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat yang berpijak pada semangat pemberdayaan masyarakat, maka KKN yang diselenggarakan oleh STPMD “APMD” Yogyakarta dibingkai dalam tema:

“Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa”

Penempatan mahasiswa KKN di wilayah pedesaan diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi setempat, mampu mencari alternatif solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta menyelesaikannya bersama masyarakat. Dengan demikian semangat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara bersamaan, tanpa mengurangi peran masyarakat sebagai aktor pembangunan.

Melalui proses pembelajaran bersama diharapkan terjadi saling tukar pengetahuan, *sharing* pengalaman serta penularan ketrampilan, sehingga dapat memunculkan kreativitas masyarakat dalam berbagai bentuk karyanya. Apabila masyarakat mampu mewujudkan kreativitasnya, berarti akan menghasilkan karya nyata yang dimungkinkan akan berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kehadiran mahasiswa KKN diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator, mediator ataupun sebagai inisiator, yang dapat mempertemukan antara kebutuhan masyarakat dengan sumber-sumber dan potensi lokal yang dimiliki. Keluaran dari kegiatan ini dapat memberi kontribusi dalam peningkatan produktivitas masyarakat dalam berbagai bidang. Proses pemberdayaan seperti ini berlangsung secara berkelanjutan, sehingga dalam perjalannya dari waktu ke waktu masyarakat desa, semakin hari semakin bertambah maju.

Secara konseptual kehidupan masyarakat desa yang dinamis dan berkelanjutan tersebut mengandung enam modal utama, yaitu:

- a. Modal alam, meliputi: ketersediaan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, iklim, kesuburan tanah, topografi, dan lain-lain.
- b. Modal fisik, terutama berupa prasarana dan sarana fisik yang dimiliki desa.
- c. Modal sosial, meliputi: institusi lokal, organisasi sosial, nilai-nilai lokal, kepemimpinan, keamanan, kerukunan, dan lain-lain.
- d. Modal manusia, menyangkut jumlah dan kualitas manusia: jumlah penduduk, komposisi penduduk, pendidikan, ketrampilan, kesehatan, kemampuan akses informasi, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain.
- e. Modal ekonomi berupa sumber-sumber dan potensi ekonomi masyarakat dan desa yang bisa dikembangkan (meliputi pertanian, industri, jasa).
- f. Modal politik, meliputi: pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa, partisipasi masyarakat, praktik demokrasi desa, kebijakan desa, partai politik, dan lain-lain.

Dari enam modal utama yang diperlukan dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat desa tersebut ada 4 macam modal yang mendapat penekanan dalam pelaksanaan KKN, yaitu: modal sosial; modal manusia; modal ekonomi; dan modal politik. Pilihan ini didasarkan atas 2 alasan: *pertama*, kekhasan ilmu yang dikembangkan di STPMD "APMD" adalah pada bidang kajian sosial dan politik; *kedua*, diasumsikan bahwa modal fisik dan modal alam akan lebih mudah dikelola dan dikembangkan apabila empat modal lainnya telah berkembang.

I. Program Kegiatan KKN

Kegiatan KKN dibagi menjadi program kegiatan utama dan program kegiatan pendukung.

a. Program kegiatan utama

Pelaksanaan program utama lebih bersifat kegiatan kelompok. Program utama kegiatan KKN pada dasarnya berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis dan mempunyai dampak yang luas dalam rangka proses memberdayakan masyarakat desa. Program kegiatan ini merupakan hasil pemetaan/analisis sosial desa yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN saat observasi. Kegiatan analisis sosial dapat ditempuh dengan tiga tahapan dan capaian, yaitu:

- 1) Pemetaan potensi dan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat desa.
- 2) Perumusan kerangka strategi pengembangan potensi dan pemecahan masalah secara bersama-sama dan partisipatif.
- 3) Perumusan rencana tindakan (*action plan*) secara partisipatif yang kemudian ditindaklanjuti oleh masyarakat desa dan mahasiswa melalui kegiatan KKN. Dalam hal ini mahasiswa bisa berperan sebagai inisiator, fasilitator dan pendamping.

Dalam melakukan analisis sosial ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Wawancara mendalam dengan *stakeholders* masyarakat desa.
- 2) *Focus Group Discussion* dengan berbagai kelompok masyarakat di lokasi KKN.
- 3) Melibatkan diri pada forum-forum pertemuan yang ada di desa.
- 4) Mengamati situasi dan kecenderungan-kecenderungan yang berkembang di masyarakat.

b. Program kegiatan pendukung

Program kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan bisa rapid respon terhadap kebutuhan masyarakat, dilaksanakan secara kelompok dan individu. Program kegiatan pendukung ini bukan merupakan hasil analisis sosial.

Perlu diingat, bahwa kegiatan yang akan dilakukan hendaknya bukan keinginan sepihak dari mahasiswa KKN sendiri, melainkan atas kebutuhan masyarakat. Program-program kegiatan yang sifatnya “*top-down*” dan yang bersifat mengambil alih peran masyarakat perlu dihindari, karena program kegiatan seperti itu seringkali justru tidak memberdayakan masyarakat desa. Selain itu penyusunan program kerja yang merupakan usulan dari warga masyarakat perlu di seleksi, tidak harus semua usulan dipenuhi, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, serta jangka waktu yang telah ditetapkan.

J. Organisasi Pengelola

1. Penanggung Jawab Umum : Ketua STPMD “APMD”
2. Pengendali Utama : Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Ketua Pelaksana : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STPMD “APMD”
4. Sekretaris Pelaksana : Sekretaris P3M STPMD “APMD”
5. Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan : Kepala Bidang Pengabdian P3M STPMD “APMD”
6. Dosen Pembimbing Lapangan : Dosen Tetap STPMD “APMD”
7. Pembantu Pelaksana : Staf Sekretariat P3M STPMD “APMD” dan Staf Administrasi pada bagian lain yang terkait
8. Mahasiswa Peserta KKN (berlaku untuk KKN Reguler dan KKN Khusus) :
 - a. Koordinator mahasiswa tingkat Kecamatan (Korcam)
 - b. Koordinator mahasiswa tingkat Desa (Kordes)
 - c. Koordinator mahasiswa tingkat Dusun (Kordus)

Struktur organisasi pengelola KKN dapat berubah dalam setiap penyelenggaraan KKN disesuaikan dengan kebutuhan.

Uraian tugas dari masing-masing bagian organisasi pengelola adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Umum:

- a. Memimpin dan menjalankan wewenang untuk menyusun kebijakan umum penyelenggaraan KKN.
- b. Memberi penjelasan dan pengarahan tentang kebijakan umum KKN kepada mahasiswa dan anggota pengelola yang berkedudukan di bawahnya.
- c. Melakukan pemantauan di lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan KKN yang dibuatnya.
- d. Bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan KKN, baik ke dalam (STPMD “APMD” dan Yayasan Pengembangan Pendidikan “Tujuh Belas”) maupun keluar (Masyarakat, Pemerintah maupun pihak lain yang terkait).

2. Pengendali Utama:

- a. Mengkoordinasikan kerjasama antara pihak P3M selaku pelaksana kegiatan KKN dengan pihak Program Studi di lingkungan STPMD “APMD” selaku pelaksana bidang akademik.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan KKN demi tercapainya tujuan kegiatan KKN.
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian anggaran pelaksanaan KKN.
- d. Bertanggungjawab atas persyaratan akademik yang diberlakukan bagi peserta KKN.
- e. Melakukan pemantauan langsung di lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan KKN, khususnya dalam rangka memperoleh masukan demi penyempurnaan kurikulum.
- f. Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Umum.

3. Ketua Pelaksana:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota-anggota pengelola yang berkedudukan di bawahnya.
- b. Bersama-sama dengan Pengendali Utama melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak Program Studi.
- c. Melakukan fungsi pelaksana operasional KKN meliputi perencanaan, pembuatan keputusan tingkat operasional, dan pelaksanaan kegiatan lapangan.
- d. Melaksanakan hubungan ke luar dalam kaitannya dengan pelaksanaan KKN.

- e. Dalam hal berhalangan sementara (berhalangan hadir), wajib memberikan mandat baik lisan maupun tertulis kepada Sekretaris Pelaksana untuk sementara melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan KKN kepada Penanggungjawab Umum.

4. Sekretaris Pelaksana:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan urusan ke dalam maupun ke luar yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional KKN, mulai sejak tahap persiapan sampai dengan tahap akhir kegiatan KKN. Dalam hal ini termasuk pengurusan perijinan kepada Pemerintah.
- b. Merencanakan dan mengendalikan anggaran pelaksanaan operasional KKN.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat intern pengelola maupun rapat pengelola bersama pihak lain.
- d. Mengkoordinasikan proses penilaian mahasiswa terhadap hasil pelaksanaan KKN.
- e. Menyiapkan usulan Tim Panitia pelaksana KKN.
- f. Dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan sementara (berhalangan hadir), atas mandatnya Sekretaris Pelaksana dapat menjalankan fungsi untuk memimpin dan mengkoordinasikan jalannya pelaksanaan KKN, termasuk membuat keputusan operasional sepanjang tidak menyimpang dari kebijakan umum KKN.
- g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

5. Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan operasional KKN.
- b. Bertindak sebagai koordinator harian dalam pelaksanaan pembekalan, pelatihan peserta KKN dan tugas operasional lapangan.
- c. Bertugas menyusun tatakala pembekalan/pelatihan bagi peserta KKN dan pengadaan Penceramah dan Instrukturnya.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- e. Mengkoordinasikan pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan KKN, antara lain: ruang kelas dan kelengkapannya; sarana transportasi, konsumsi, perlengkapan KKN untuk mahasiswa, dan lain-lain.
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

6. Pembantu Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan:

- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas pelatihan dan operasional lapangan; terutama dalam mengkoordinasikan tugas DPL, pengadaan penceramah dan instruktur pelatihan, pemantauan dan pengarahan kegiatan mahasiswa di lokasi.
- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan.

7. Dosen Pembimbing Lapangan:

- a. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN dengan masyarakat dan pemerintah setempat di lokasi KKN.
- b. Menggerakkan disiplin mahasiswa, memberikan motivasi, mengarahkan kegiatan dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa KKN demi tercapainya tujuan kegiatan KKN.
- c. Memantau interaksi antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
- d. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan serta perilaku mahasiswa di lokasi KKN.
- e. Mengarahkan, memeriksa, menampung dan menyalurkan data kegiatan dan seluruh laporan pelaksanaan KKN dari mahasiswa kepada Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan.
- f. Melakukan penilaian terhadap prestasi mahasiswa dalam melaksanakan KKN.
- g. Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN dan disampaikan kepada Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan.
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan.

8. Pembantu Pelaksana:

- a. Bidang Kesekretariatan:
 - 1) Menyiapkan surat-surat dan berkas-berkas lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan KKN; seperti surat perijinan, blanko pendaftaran, pengandaan bahan-bahan latihan, dan lain-lain.
 - 2) Menyiapkan dan membagikan perlengkapan KKN untuk mahasiswa.
 - 3) Menerima, menata dan menyimpan berkas-berkas laporan kegiatan KKN.

- 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Pelaksana dan atau Koordinator Pembekalan/Pelatihan dan Kegiatan Lapangan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

b. Bidang Keuangan:

- 1) Melayani penerimaan pembayaran uang biaya KKN dari mahasiswa.
- 2) Melayani pengeluaran uang untuk keperluan pelaksanaan KKN atas persetujuan Ketua Pelaksana atau Sekretaris Pelaksana.
- 3) Mengadministrasikan keuangan, baik uang masuk maupun keluar.
- 4) Melaporkan keadaan keuangan kepada Ketua Pelaksana atau Sekretaris Pelaksana.
- 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

9. Mahasiswa Peserta KKN (untuk KKN Reguler dan KKN Khusus)

a. Koordinator mahasiswa tingkat Kecamatan (Korcam):

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan mahasiswa KKN dari semua desa dalam satu kecamatan.
- 2) Memberikan laporan kepada DPL atau Pengelola KKN lainnya, dan atau Camat apabila ada kejadian penting.
- 3) Menyampaikan informasi kepada Koordinator-Koordinator Desa tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan oleh mahasiswa di setiap desa.

b. Koordinator mahasiswa tingkat Desa (Kordes):

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan mahasiswa KKN dari semua dusun dalam satu desa.
- 2) Memberikan informasi kepada Korcam atau melapor kepada DPL, dan atau Kepala Desa apabila ada kejadian penting.
- 3) Menyampaikan informasi kepada Koordinator-Koordinator Dusun tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan oleh mahasiswa di setiap dusun.

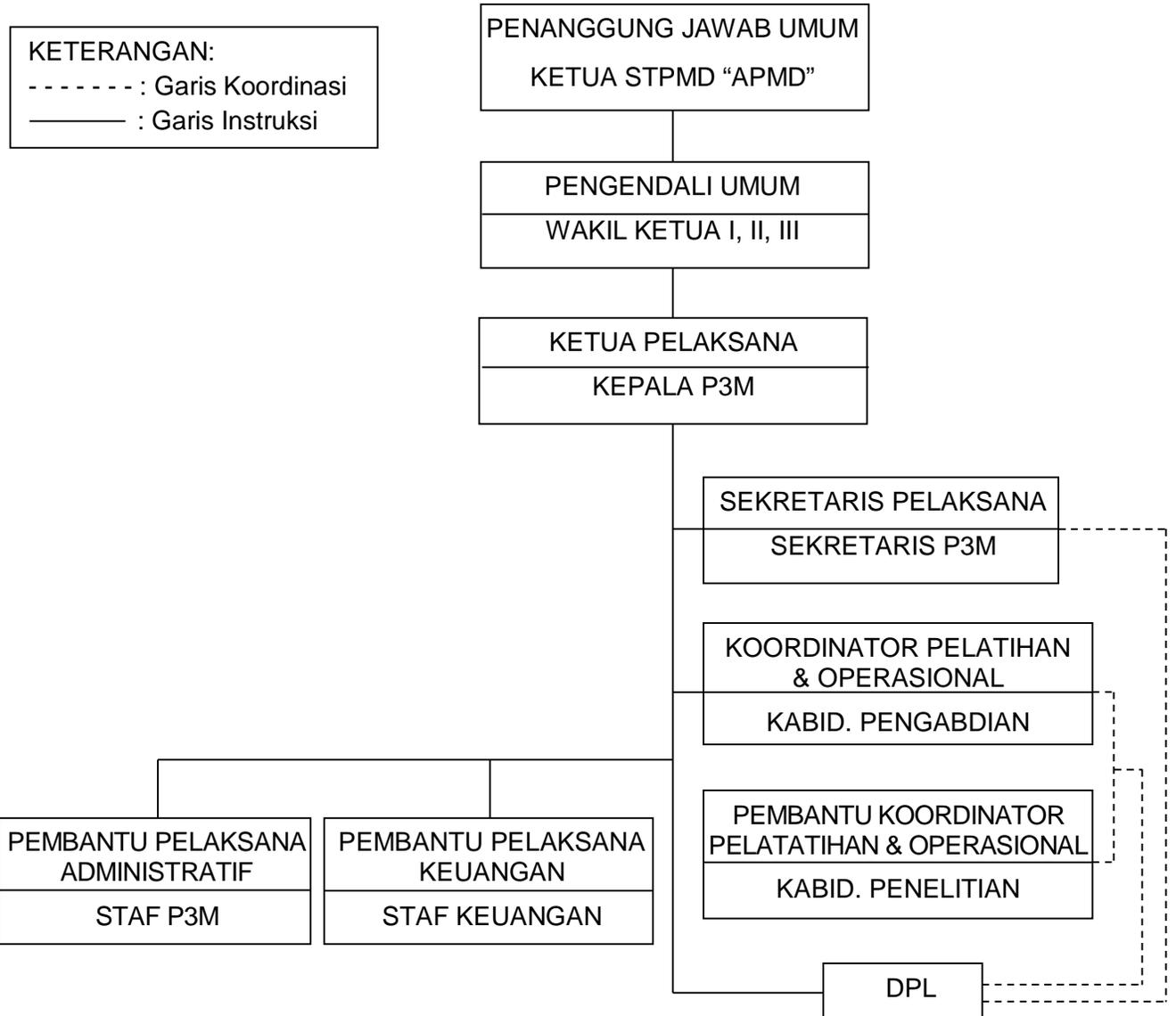
c. Koordinator mahasiswa tingkat Dusun (Kordus)

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan mahasiswa dalam satu dusun, baik sejak tahap persiapan di kampus, pelaksanaan kegiatan di lokasi, sampai dengan kegiatan pasca penarikan dari lokasi.
- 2) Mewakili kelompok dusun pada pertemuan mahasiswa dalam rangka koordinasi kegiatan di tingkat desa.
- 3) Menyampaikan informasi tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kelompoknya.
- 4) Memberikan informasi kepada Kordes atau melapor kepada DPL, dan atau Kepala Dusun apabila ada kejadian penting.
- 5) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembuatan laporan kegiatan KKN, termasuk realisasi penggunaan dana, dari kelompoknya.

Untuk melaksanakan kegiatan KKN Reguler dan KKN Khusus dibentuk Panitia Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Ketua STPMD "APMD", dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh P3M.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA KKN



BAB II

PERSIAPAN

A. Konsultasi, Koordinasi, dan Publikasi

Penyelenggaraan KKN pada setiap semester diawali dengan kegiatan penyusunan rancangan KKN oleh P3M. Rancangan ini kemudian dikonsultasikan kepada Pimpinan STPMD “APMD” dalam forum rapat Pimpinan Lengkap untuk mendapatkan pengarahannya dan persetujuannya. Setelah rancangan KKN mendapat persetujuan dari Pimpinan kemudian dilakukan koordinasi dengan Para Pengurus Program Studi, Bagian Administrasi Akademik (BAAK), Bagian Administrasi Umum (BAU), Bagian Keuangan, dan bagian-bagian lain yang terkait. Koordinasi ini sangat penting dilakukan agar setiap pihak terkait dapat membantu kelancaran persiapan dan pelaksanaan KKN.

Koordinasi dengan Para Pengurus Program Studi dimaksudkan untuk dapat ikut membantu dalam pengarahannya mahasiswa yang akan mengikuti KKN dan membantu kelancaran dalam penentuan Dosen Pembimbing Lapangan. Selain itu, melalui koordinasi tersebut P3M selaku pelaksana KKN akan memperoleh masukan-masukan tentang arah kegiatan KKN yang dapat memperkuat efektifitas pembelajaran bagi mahasiswa dari setiap Program Studi.

Koordinasi dengan BAAK sangat diperlukan untuk memperoleh data mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik untuk mengikuti KKN. Data ini sangat penting untuk membuat prediksi jumlah mahasiswa calon peserta KKN yang sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran biaya, penyediaan perlengkapan mahasiswa, dan lain-lain. Koordinasi dengan BAU diperlukan untuk dapat membantu dalam penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat memperlancar kegiatan KKN, antara lain: penggunaan mobil kampus, pengaturan kerja staf administrasi, penyediaan ruang untuk pembekalan, dan sebagainya. Demikian pula koordinasi dengan Bagian Keuangan sangat penting dilakukan agar dapat ikut membantu ketertiban dan kelancaran keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KKN.

Setelah rancangan KKN dirasa sudah mantap, selanjutnya dilakukan publikasi kepada mahasiswa tentang rencana penyelenggaraan KKN. Publikasi ini dilakukan dengan cara memasang pengumuman di papan-papan informasi

yang tersedia di kampus agar mempermudah mahasiswa untuk segera tahu akan diselenggarakannya KKN.

B. Observasi, Penentuan Lokasi dan Penempatan Mahasiswa

Pelaksanaan observasi, penentuan lokasi dan penempatan mahasiswa untuk KKN Reguler dan KKN Tematik dilakukan oleh P3M; KKN Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama; KKN Khusus diselenggarakan khusus untuk mahasiswa yang bekerja, penentuan lokasi dipilih oleh mahasiswa sendiri, Sedangkan untuk KKN Tanggap Bencana diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan STPMD"APMD". Semua tipologi desa pada dasarnya dapat digunakan sebagai lokasi KKN, baik desa di daerah perbukitan, desa pantai (pernelayanan), maupun desa di daerah dataran rendah (ngarai).

Berikut ini merupakan penjelasan tentang pelaksanaan observasi, penentuan lokasi dan penempatan mahasiswa yang berlaku untuk KKN Reguler.

Sebelum menetapkan lokasi KKN dilakukan observasi terlebih dahulu oleh P3M selaku pengelola KKN ke beberapa desa calon lokasi KKN. Observasi ini dimaksudkan agar pengelola KKN memiliki data wilayah yang lengkap dan akurat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penentuan lokasi KKN serta dalam rangka perencanaan penempatan (*plotting*) mahasiswa. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung desa-desa yang dimungkinkan untuk dijadikan lokasi KKN. Dalam kunjungan tersebut dilakukan wawancara dengan kepala desa atau perangkat desa lainnya tentang berbagai keadaan yang ada di desa bersangkutan, terutama mengenai masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki masyarakat. Hasil observasi tentang keadaan wilayah desa-desa tersebut dibawa ke kampus dan dibahas oleh pengelola KKN untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan lokasi KKN .

Berdasarkan hasil pembahasan tentang masalah, potensi desa, dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan (misalnya: tingkat kesulitan lokasi, faktor keamanan, sikap dan tanggapan perangkat desa terhadap KKN, dll) kemudian dipilih satu atau beberapa desa untuk ditetapkan sebagai lokasi KKN. Penentuan lokasi KKN juga didasarkan atas kesediaan kepala desa untuk mengizinkan desanya digunakan sebagai lokasi KKN. Jumlah desa yang ditetapkan untuk lokasi KKN disesuaikan dengan kebutuhan (tergantung jumlah peserta KKN).

Desa yang terpilih sebagai lokasi KKN selanjutnya dikunjungi lagi untuk membicarakan tentang berbagai hal yang menyangkut keperluan-keperluan yang harus dipersiapkan oleh pengelola KKN; terutama menyangkut kemungkinan transportasi sampai ke pedukuhan, biaya hidup untuk mahasiswa, tempat menginap mahasiswa, dan lain-lain. Pada kunjungan lanjutan ini melibatkan DPL untuk observasi yang dilakukan sampai ke tingkat pedukuhan dan rumah tangga yang akan ditempati mahasiswa, serta untuk mengadakan pendekatan sosial kepada masyarakat.

Mahasiswa peserta KKN Reguler ditempatkan di pedukuhan-pedukuhan yang sekaligus sebagai lokasi wilayah kerja kelompok. Dasar pertimbangan penempatan mahasiswa di setiap pedukuhan adalah sebagai berikut:

1. Rasio jenis kelamin
2. Komposisi Program Studi
3. Komposisi daerah asal mahasiswa
4. Penguasaan Bahasa Jawa
5. Ketersediaan kendaraan bermotor
6. Pertimbangan-pertimbangan lain menurut permintaan masyarakat atau pemerintah desa

C. Pengurusan Ijin

Pengurusan perijinan KKN Reguler sepenuhnya dilakukan oleh P3M selaku pengelola KKN. Pengurusan ijin lokasi untuk KKN Khusus, KKN Tematik dan KKN Tanggap Bencana dilakukan oleh mahasiswa, dan P3M memfasilitasi surat-surat yang diperlukan. Sedangkan untuk KKN kerja sama pengurusan ijin dilakukan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau institusi lain.

Pengurusan ijin lokasi dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam hal ini, pengurusan ijin dilakukan di tingkat desa kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Demikian seterusnya, dari tingkat kecamatan dilanjutkan pengurusannya ke tingkat kabupaten dan propinsi (prosedur pengurusan surat ijin menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah). Setelah memperoleh surat ijin, maka kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan syah. Seringkali pengurusan ijin di setiap tingkatan tidak selalu dapat diselesaikan dalam 1 hari, sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu

pengurusan ijin mulai dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum hari pemberangkatan mahasiswa ke lokasi.

D. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran mahasiswa peserta KKN Reguler dilakukan setelah ujian akhir semester II. Pendaftaran KKN Khusus dan KKN Tematik dilakukan setiap awal semester I dan semester II. Sedangkan KKN Tanggap Bencana dan KKN Kerja Sama diatur secara tersendiri.

Adapun syarat pendaftaran sebagai berikut:

1. KKN Reguler:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan.
- b. Telah lulus teori dan atau minimal telah menempuh 120 SKS.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
- d. Sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Siklus Tahunan Desa dan LKMM
- e. Menyerahkan foto copy kuitansi pembayaran biaya KKN (dengan menunjukkan aslinya).
- f. Menyerahkan pasfoto ukuran 3 X 4 cm sebanyak 5 lembar.
- g. Menyerahkan foto copy SKHU sebanyak 1 lembar (dengan menunjukkan aslinya).
- h. Menyerahkan foto copy KRS pada semester sedang berjalan sebanyak 1 lembar yang mencantumkan KKN dalam KRS.
- i. Keadaan kesehatan mahasiswa layak untuk melaksanakan kegiatan KKN yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter.
- j. Mahasiswa yang sedang hamil wajib menyerahkan surat ijin mengikuti KKN dari suami dan menyerahkan 1 lembar photo copy surat nikah.
- k. Mengisi formulir pendaftaran.

2. KKN Khusus:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan.
- b. Telah lulus teori dan atau minimal telah menempuh 120 SKS.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
- d. Menyerahkan foto copy kuitansi pembayaran biaya KKN (dengan menunjukkan aslinya).
- e. Menyerahkan pasfoto ukuran 3 X 4 cm sebanyak 5 lembar.

- f. Menyerahkan foto copy SKHU sebanyak 1 lembar (dengan menunjukkan aslinya).
- g. Menyerahkan foto copy KRS pada semester sedang berjalan yang mencantumkan KKN dalam KRS.
- h. Mengisi formulir pendaftaran.
- i. Tidak memiliki nilai K lebih dari 5 (lima).
- j. Membayar biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. KKN Tematik:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan.
- b. Telah lulus teori dan atau minimal telah menempuh 124 SKS.
- c. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76.
- d. Sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Siklus Tahunan Desa dan LKMM
- e. Dilakukan berkelompok 3 – 5 orang.
- f. Menyerahkan foto copy kuitansi pembayaran biaya KKN (dengan menunjukkan aslinya).
- g. Menyerahkan pasfoto ukuran 3 X 4 cm sebanyak 5 lembar.
- h. Menyerahkan foto copy SKHU sebanyak 1 lembar (dengan menunjukkan aslinya).
- i. Menyerahkan foto copy KRS pada semester sedang berjalan sebanyak 1 lembar yang mencantumkan KKN dalam KRS.
- j. Keadaan kesehatan mahasiswa layak untuk melaksanakan kegiatan KKN yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter.
- k. Mahasiswi yang sedang hamil wajib menyerahkan surat ijin mengikuti KKN dari suami dan menyerahkan 1 lembar photo copy surat nikah.
- l. Mengisi formulir pendaftaran.

Persyaratan KKN Tanggap Bencana dan KKN Kerja Sama serta mekanismenya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pembekalan dan Pelatihan

Khusus untuk mahasiswa peserta KKN Reguler sebelum diberangkatkan dan melaksanakan tugasnya di lokasi KKN, perlu dibekali dengan beberapa pengetahuan praktis dan ketrampilan yang dapat mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilakukan di lokasi. Pembekalan dilakukan dengan

memberikan ceramah dan diskusi, serta pelatihan-pelatihan yang dikemas secara sistematis dan terorganisasi. Dalam pelatihan mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik tentang materi pelatihan sebagai persiapan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Materi pembekalan dan pelatihan disesuaikan dengan masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di desa lokasi KKN.

Materi pembekalan/pelatihan antara lain sebagai berikut:

1. Pembekalan bagi peserta KKN Reguler

- a. Relevansi KKN dalam konteks pengembangan perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Teknis operasional dan mekanisme kerja KKN.
- c. Pemahaman tentang Pemberdayaan Kehidupan Masyarakat yang Kreatif, Produktif, dan Partisipatif.
- d. Materi-materi lain yang relevan dengan tema KKN, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi lokasi KKN.

Pola pelaksanaan pembekalan/pelatihan selama 5-6 hari, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan latihan praktik di dalam kelas. Selain pemberian materi juga dilakukan pembagian kelompok dan pemilihan koordinator pedukuhan (kordus) dan koordinator desa (kordes). Kegiatan akhir dari pembekalan /pelatihan adalah ujian (*general test*).

2. Pembekalan bagi peserta KKN Khusus, KKN Tematik, KKN Tanggap Bencana dan KKN Kerjasama diatur secara tersendiri.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL KKN

A. Penerjunan Mahasiswa KKN ke Lokasi

Pada hari dan jam yang telah ditentukan, mahasiswa, DPL dan tim pelaksana KKN berkumpul di kampus untuk persiapan penerjunan. DPL bersama koordinator pedukuhan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota kelompoknya, untuk mengetahui kehadiran para anggotanya. Kegiatan dilanjutkan dengan upacara singkat untuk menerima pengumuman-pengumuman dari tim pelaksana dan sebelum berangkat dilakukan doa bersama. Kemudian rombongan menuju ke lokasi (kantor desa) untuk mengadakan upacara serah terima dari pihak STPMD “APMD” kepada pihak pemerintah desa setempat. Setelah upacara serah-terima berakhir, mahasiswa di bawah koordinasi DPL dan kepala pedukuhan berangkat menuju pedukuhan masing-masing dan DPL menyerahkan mahasiswa kepada tuan rumah tempat mahasiswa menginap.

B. Observasi, Penyusunan Program Kerja, Sosialisasi dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja

Observasi dilakukan setelah mahasiswa peserta KKN diterjunkan ke lokasi. Peserta KKN diberi kesempatan untuk melakukan observasi secara mandiri. Mahasiswa melakukan observasi lapangan dan mengadakan pendekatan-pendekatan sosial kepada dukuh, tokoh-tokoh masyarakat serta warga pedukuhan umumnya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal dan menghayati tata-cara dan tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat desa. Kegiatan ini kecuali bertujuan untuk melakukan pendekatan sosial juga untuk mengenal dan menemukan potensi desa/pedukuhan, kebutuhan masyarakat dan masalah-masalah yang dihadapi warga masyarakat dan pemerintah lokal secara tepat dan terperinci. Aspek-aspek yang sebaiknya diobservasi antara lain: keberadaan institusi lokal, keadaan sosial-ekonomi-budaya, demografis, tata pemerintahan, keadaan pertanian dalam arti luas, keadaan kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan geografis dan lain-lain. Hasil observasi tersebut kemudian didiskusikan bersama di dalam kelompok dan didampingi DPL, yang

selanjutnya hasil diskusi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun program kerja KKN.

Mahasiswa wajib membuat laporan hasil observasi dan program kerja. Dalam menyusun laporan harus melibatkan seluruh anggota kelompok, sehingga tidak dibenarkan ada anggota kelompok yang tidak ikut aktif dalam penyusunan laporan tersebut. Laporan hasil observasi dan program kerja diserahkan kepada DPL pada **hari ke 7** terhitung sejak hari pertama penerjunan.

Program kerja KKN yang telah disetujui DPL wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di pedukuhan. Untuk kelancaran, ketertiban dan mempermudah dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan, mahasiswa diwajibkan melakukan persiapan pelaksanaan dari setiap program kerja dengan membuat design atau rancangan kegiatan secara rinci (bentuk dan uraian kegiatan, waktu, tempat, sasaran kegiatan, dan lain-lain). Manual kegiatan KKN ditempel pada dinding rumah pondokan mahasiswa yang mudah dibaca.

C. Pelaksanaan Program Kerja dan Pelaporan Kegiatan KKN

Pelaksanaan kegiatan hendaknya disesuaikan dengan program kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama masyarakat dan atau pemerintah setempat. Perubahan program kegiatan dapat dilakukan sepanjang ada alasan pendukung yang kuat, dan alasan perubahan tersebut wajib disampaikan kepada DPL dan pada laporan akhir nantinya.

Setiap mahasiswa peserta KKN wajib membuat laporan pelaksanaan program kegiatan. Laporan tersebut merupakan salah satu pertanggungjawaban ilmiah dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Dalam laporan tersebut harus terbaca kegiatan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa baik dalam pelaksanaan program kegiatan kelompok maupun program kegiatan individu. Penyerahan laporan pelaksanaan KKN paling lambat 14 hari terhitung sejak hari penarikan dari lokasi, dan laporan tersebut diserahkan kepada DPL dan P3M. Laporan ini menjadi bahan ujian bagi setiap peserta KKN, sehingga isi laporan hendaknya dibuat benar-benar sesuai dengan keadaan senyatanya dan mengacu pada buku panduan KKN.

Selain mahasiswa, DPL serta tim Pelaksana wajib membuat laporan pelaksanaan KKN. Laporan yang dibuat oleh DPL disampaikan kepada Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan, paling lambat 7 hari terhitung sejak hari terakhir pelaksanaan ujian bagi peserta KKN. Untuk laporan yang

dibuat oleh tim Pelaksana disampaikan kepada Penanggungjawab, paling lambat 21 hari terhitung sejak hari terakhir pelaksanaan ujian bagi peserta KKN.

D. Pembimbingan dan Pemantauan

Pembimbingan dimaksudkan untuk memberikan arahan dan bantuan kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi selama melaksanakan tugas lapangan. Pemantauan kegiatan KKN bertujuan untuk mengetahui proses kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa, sehingga ketika terjadi kesulitan atau kendala-kendala dapat segera diatasi. Melalui pembimbingan dan pemantauan diharapkan agar kegiatan KKN dapat berjalan tertib, lancar dan terarah sehingga tujuan KKN dapat tercapai.

Kegiatan pembimbingan dan pemantauan dilakukan terutama oleh DPL dengan semangat “Kepamongan”. Dalam melaksanakan pembimbingan dan pemantauan, DPL difasilitasi oleh P3M untuk 4 kali kunjungan ke lokasi. Pelaksanaan pemantauan kegiatan mahasiswa, selain melalui pengamatan langsung di lapangan, DPL perlu memeriksa laporan kegiatan mahasiswa yang dicatat dalam buku harian. Mahasiswa perlu diingatkan agar cermat dalam membuat laporan kegiatan, karena laporan tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan akhir KKN. Dalam pelaksanaan tugas ini, DPL perlu memberikan nasihat, teguran dan jika perlu peringatan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib.

Pembimbingan dan pemantauan kegiatan mahasiswa juga dilakukan oleh Pimpinan STPMD “APMD” dan tim pelaksana dari unsur P3M. Kehadiran Pimpinan STPMD “APMD” ke lokasi sangat berarti bagi mahasiswa maupun masyarakat setempat, karena mahasiswa maupun masyarakat akan merasa diperhatikan, sehingga dapat mendorong semangat kerja mereka. Selain itu, melalui kehadirannya di lokasi berarti dapat langsung mengamati kiprah kerja mahasiswa, dan ini penting untuk bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di kampus.

Kehadiran tim Pelaksana dari unsur P3M diperlukan untuk menjaga kelancaran proses kegiatan di lapangan. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menghambat kegiatan operasional KKN dapat segera diambil langkah-langkah solusinya.

E. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi

Setelah mahasiswa selesai menjalankan KKN sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka mahasiswa ditarik dari lokasi untuk kembali ke kampus. Pada acara penarikan ini mahasiswa peserta KKN, DPL dan tim Pelaksana berkumpul di kantor desa untuk mengadakan upacara pamitan dan serah-terima dari pemerintah desa kepada STPMD “APMD”.

Sesuai upacara pamitan dan serah-terima mahasiswa, DPL, dan tim Pelaksana berangkat meninggalkan lokasi menuju kampus. Sesampai di kampus, mahasiswa peserta KKN sebelum pulang ke tempat tinggal masing-masing hendaknya melakukan koordinasi lagi dengan kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan tugas-tugas pembuatan laporan.

BAB IV

EVALUASI

Dalam kegiatan evaluasi ada dua sasaran yang perlu dinilai, yaitu: penyelenggaraan KKN oleh tim Pelaksana dan kegiatan mahasiswa peserta KKN. Evaluasi terhadap penyelenggaraan KKN dilakukan oleh Penanggungjawab Umum dan Pengendali Utama. Evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa peserta KKN dilakukan oleh: DPL, tim Pelaksana, dukuh, tokoh masyarakat, dan mahasiswa sendiri.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan KKN dimaksudkan agar diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai maupun dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan program KKN selanjutnya.

A. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi terhadap peserta KKN dilakukan sejak tahap pembekalan dan pelatihan, general test, observasi, pelaksanaan tugas KKN di lokasi, sampai dengan laporan akhir. Secara lebih terperinci evaluasi terhadap mahasiswa peserta KKN meliputi:

1. Kedisiplinan Pembekalan dan Pelatihan dan General test
2. Laporan observasi dan rencana kegiatan, terutama menyangkut:
 - a. Perumusan masalah
 - b. Ketepatan metode pengumpulan dan analisis data
 - c. Relevansi materi program kegiatan dengan tujuan kegiatan dan hasil observasi
 - d. Uraian kegiatan dan jadwal kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan lapangan, yang terdiri atas:
 - a. Kedisiplinan:
 1. Kepatuhan tinggal di lokasi KKN
 2. Ketepatan dalam penggunaan waktu
 3. Kepatuhan terhadap tata tertib KKN

- b. Kerjasama:
 - 1. Kemampuan untuk menjalin kerjasama antar mahasiswa
 - 2. Kemampuan untuk menjalin kerjasama antara mahasiswa dengan: pejabat pemerintah setempat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat
- c. Penghayatan:
 - 1. Kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan lokasi KKN
 - 2. Kemampuan melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat
 - 3. Kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di lokasi KKN
- d. Pelaksanaan:
 - 1. Kemampuan menggali, mengungkapkan, dan memecahkan masalah yang terjadi di lokasi KKN
 - 2. Kemampuan melaksanakan program kegiatan KKN
 - 3. Kemampuan mengevaluasi hasil kerja KKN yang dilaksanakan mahasiswa
- 4. Laporan akhir kegiatan KKN yang dipertanggungjawabkan melalui ujian lisan, yang mencakup:
 - a. Sistematika Laporan
 - b. Kelengkapan isi/uraian
 - c. Penguasaan materi laporan
 - d. Keaslian laporan

B. Bobot Komponen Penilaian:

- 1. Kedisiplinan dan hasil *general test* Pembekalan/Pelatihan: **20 %**
- 2. Laporan observasi dan rencana kegiatan: **10 %**
- 3. Pelaksanaan kegiatan lapangan:
 - a. Kedisiplinan: **10 %**
 - b. Kerjasama: **10 %**
 - c. Penghayatan: **10 %**
 - d. Pelaksanaan: **25 %**
- 4. Ujian laporan akhir KKN: **15 %**

C. Beberapa Ketentuan Lain dalam Evaluasi:

- 1. Hasil evaluasi akhir merupakan nilai KKN secara individual (bukan nilai kelompok).

2. Nilai KKN diperhitungkan berdasarkan perolehan score dari setiap komponen penilaian, kemudian total score yang diperoleh dikonversi menjadi nilai huruf dengan kriteria sebagai berikut:

INTERVAL	NILAI HURUF	BOBOT NILAI	PREDIKAT
100 – 80	A	4,0	Sangat Baik
79,99 – 76,66	A-	3,6	
76,65 – 73,33	B+	3,3	Baik
73,32 – 70,00	B	3,0	
69,99 – 66,66	B-	2,6	
66,65 – 63,33	C+	2,3	Cukup
63,32 – 60,00	C	2,0	
59,99 – 56,66	C-	1,6	
56,65 – 53,33	D+	1,3	Kurang
53,32 – 50,00	D	1	
49,99 – 0	E	0	Gagal

3. Penentuan Nilai akhir ditetapkan melalui rapat koordinasi yang terdiri dari DPL, P3M, Pengendali utama dan Penanggungjawab umum. Tim Pelaksana KKN (P3M) berhak menunda nilai apabila terdapat tugas dan kewajiban yang belum dapat dipenuhi oleh peserta KKN.
4. Nilai hasil evaluasi tidak dapat diganggu-gugat.
5. Peserta Kuliah Kerja Nyata yang menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan gugur diwajibkan untuk mengulang kegiatan KKN pada periode berikutnya.
6. Peserta KKN dapat memperbaiki nilai dengan mengikuti KKN kembali pada periode berikutnya sesuai persyaratan yang ditetapkan.

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI

A. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa:

1. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh tim Pelaksana KKN mulai dari Pembekalan dan Pelatihan serta General Test, observasi dan penyusunan program kegiatan, Pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir.
2. Mahasiswa peserta KKN reguler wajib tinggal di lokasi selama waktu pelaksanaan KKN yang telah dijadwalkan.
3. Mahasiswa peserta KKN yang meninggalkan lokasi untuk keperluan pribadi (di luar program KKN) hanya diperbolehkan bila ada ijin dari DPL dan harus sepengetahuan tim Pelaksana.
4. Mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan DPL menyusun program kerja hasil observasi lokasi berdasarkan identifikasi masalah, membuat proposal untuk memperoleh dana bantuan program dengan dikoordinasi ketua kelompok.
5. Mahasiswa peserta KKN dalam membuat Program kerja harus sepengetahuan Pamong Desa (Kepala Desa dan DUKUH) dengan cara musyawarah.
6. Mahasiswa peserta KKN wajib mensosialisasikan Program kerjanya dan memusyawarahkannya dengan masyarakat.
7. Mahasiswa peserta KKN dalam melaksanakan program kerjanya wajib melibatkan masyarakat.
8. Mahasiswa peserta KKN melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh DPL. Jika terjadi perubahan program kerja, harus sepengetahuan DPL dan ada alasan mengenai perubahan tersebut. Peserta KKN dapat melaksanakan program kerja di luar program kerja yang telah disusun, sebagai program tambahan dengan sepengetahuan DPL ataupun pamong desa setempat.
9. Mahasiswa peserta KKN diperbolehkan melaksanakan kegiatan di luar lokasi kerjanya apabila ada permintaan masyarakat dan disetujui oleh DPL serta Pamong Desa setempat.
10. Mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan seluruh kegiatan KKN dengan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
11. Mahasiswa peserta KKN wajib mentaati peraturan pemerintah, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

12. Mahasiswa peserta KKN wajib menyesuaikan diri dan menghayati adat istiadat/pola kehidupan masyarakat di lokasi KKN.
13. Mahasiswa peserta KKN wajib menjaga keutuhan/kekompakan dan nama baik almamater.
14. Mahasiswa peserta KKN wajib mengisi buku "catatan harian" sebagai laporan kegiatan harian dan disampaikan kepada DPL pada acara kunjungan DPL maupun pada waktu pertemuan periodik.
15. Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti pertemuan periodik yang diselenggarakan oleh DPL.
16. Setelah KKN berakhir, mahasiswa peserta KKN diwajibkan menyerahkan Laporan Kegiatan KKN yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan DPL dan Kepala P3M sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk P3M. Berkas laporan yang diserahkan kepada P3M adalah berkas yang asli, penyerahan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penarikan peserta.
17. Peserta KKN diwajibkan menyerahkan *Soft File* laporan akhir kegiatan KKN yang telah disetujui oleh DPL (setelah diujikan) dalam sebuah CD ke P3M (CD disediakan oleh P3M).
18. Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti ujian laporan akhir.

B. Tata Tertib Peserta KKN

1. Tata tertib dalam pembekalan dan pelatihan:

- a. Peserta KKN wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Peserta KKN wajib mengikuti dan mengerjakan semua kegiatan yang diberikan oleh instruktur dan atau tim pelaksana KKN.
- c. Pada setiap sesi peserta KKN wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan ditarik oleh tim pelaksana 15 menit dari waktu mulainya sesi pembekalan/pelatihan.
- d. Mahasiswa peserta KKN yang tidak mengikuti general test, tidak ada kesempatan untuk mengikuti general test susulan.
- e. Selama mengikuti pembekalan/pelatihan peserta KKN wajib berpakaian rapi, sopan (dilarang memakai sandal dan kaos oblong) dan wajib menjaga kebersihan lingkungan ruang pembekalan/pelatihan.
- f. Selama pembekalan/pelatihan berlangsung peserta KKN dilarang:
 - 1) Merokok didalam ruangan (pada saat kegiatan berlangsung).

- 2) Ngobrol atau berbicara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi pembekalan/pelatihan.
- 3) Makan di dalam ruang.
- g. Peserta KKN wajib menjaga kesopanan dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada penceramah dan atau instruktur.
- h. Bagi peserta KKN yang tidak mentaati peraturan di atas maka peserta akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Tata tertib selama pelaksanaan KKN di lokasi:

- a. Mahasiswa peserta KKN harus menjunjung tinggi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Peserta KKN selama bertugas di lokasi tidak diperkenankan menerima tamu yang dapat menimbulkan dampak gangguan terhadap pelaksanaan tugas KKN di lapangan.
- c. Peserta KKN harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi rumah tangga atau keluarga yang ditempati serta mematuhi aturan rumah tangga/keluarga yang ditempati.
- d. Peserta KKN harus dapat menjaga nama baik dirinya, Lembaga STPMD “APMD”, keluarga, induk semang dan wilayah/desa yang ditempati serta menjaga kebersihan lingkungannya.
- e. Peserta KKN selama bertugas KKN hanya diperkenankan meninggalkan lokasi sebanyak-banyaknya 2 x 24 jam secara **tidak berturut-turut** dengan seijin DPL dengan mengisi blanko yang telah disediakan.
- f. Bagi mahasiswa yang meninggalkan lokasi untuk kepentingan apapun juga harus seijin ketua kelompok, koordinator lapangan (pamong desa setempat), dan tuan rumah selaku induk semang.
- g. Setiap mahasiswa peserta KKN yang akan melaksanakan kegiatan atas nama kelompok harus seijin anggota kelompok.
- h. Mahasiswa peserta KKN dilarang keras untuk melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bersifat provokatif kepada masyarakat yang dapat mengarah pada gerakan politik praktis dan atau menimbulkan keresahan masyarakat.
- i. Mahasiswa peserta KKN dilarang keras untuk melakukan tindakan-tindakan maupun ucapan asusila, mabuk, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.

- j. Mahasiswa peserta KKN dilarang melakukan transaksi hutang piutang dengan masyarakat setempat.
- k. Mahasiswa peserta KKN dilarang melibatkan diri dalam konflik yang terjadi antar warga masyarakat di lokasi KKN.

C. Sanksi

1. Peserta KKN yang melalaikan tugas kewajiban dan atau melanggar tata tertib selama pelaksanaan KKN dapat dikenakan sanksi.
2. Pada saat pembekalan dan pelatihan, peserta KKN yang tidak mengikuti salah satu acara tanpa seijin tim Pelaksana akan dianggap mangkir (bolos) 1 hari penuh, dan akan berpengaruh pada nilai prestasi KKN.
3. Apabila mahasiswa tidak berada di lokasi lebih dari 24 jam atau melebihi ijin yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa teguran dan pengurangan nilai prestasi KKN, serta sanksi-sanksi lain yang semakin berat sesuai tingkat pelanggarannya.
4. Pada saat DPL dan atau tim Pelaksana datang ke lokasi terdapat peserta KKN yang meninggalkan lokasi tanpa ijin atau atas alasan yang tidak dapat diterima maka dianggap bolos.
5. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada peserta KKN yang melalaikan tugas kewajiban dan melanggar tata tertib KKN adalah:
 - a. Peringatan I (pertama) berupa teguran secara lisan maupun tertulis oleh DPL dan atau Koordinator Pelatihan dan Operasional Lapangan.
 - b. Peringatan II (kedua) yang diberikan oleh Ketua Pelaksana KKN (Kepala P3M) apabila peringatan I tidak diindahkan/dihiraukan.
 - c. Peringatan III diberikan oleh Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta dan akan dicabut haknya sebagai peserta KKN dan dinyatakan gugur, apabila peringatan II tidak diindahkan/dihiraukan.
 - d. Sanksi akademik dan administratif berupa pencabutan hak (pemecatan) sebagai mahasiswa STPMD "APMD" oleh Pimpinan STPMD "APMD" bagi mahasiswa yang melakukan tindak kriminal, dan atau mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

D.Lain-lain

1. Dalam mendukung penyediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan program KKN:
 - a. Peserta KKN dapat mencari dana dari sponsor pihak luar yang tidak mengikat, dengan menyusun proposal yang telah disetujui oleh Kepala Desa, DPL dan P3M, serta melaporkan hasil perolehan dana dan penggunaannya ke P3M.
 - b. STPMD “APMD” hanya menyediakan dana stimulan bantuan program KKN, yang diberikan kepada setiap kelompok dan dikoordinasikan melalui P3M.
2. Setiap mahasiswa peserta KKN adalah peserta asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Koordinator peserta KKN wajib melaporkan kepada DPL atau P3M apabila terjadi musibah/kecelakaan yang menimpa anggota peserta.

Lampiran 1.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI S1 STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1 STATUS TERAKREDITASI A
• PRODI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 029/II/KPTS-K/2016

TENTANG PANDUAN KULIAH KERJA NYATA STPMD "APMD" YOGYAKARTA

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan dan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan STPMD "APMD" serta sebagai pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa STPMD "APMD", dipandang perlu ditetapkan Panduan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa STPMD "APMD" yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STPMD "APMD".
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0149/O/1989, tanggal 16 Maret 1989, tentang Perubahan Bentuk Dan Nama Akademi Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 78/D/O/2005 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 41/D/O/2005;
6. Statuta STPMD "APMD" Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Nomor : 001/KPTS-K/2012, tentang Kebijakan Pembertakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STPMD "APMD" Yogyakarta;
8. Renstra 2011-2016 dan Renop 2012-2016 STPMD "APMD".
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan STPMD "APMD" dengan P3M pada tanggal 20 Juli 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Panduan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa STPMD "APMD" Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam buku Panduan Kuliah Kerja Nyata;
Kedua : Panduan sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berlaku bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiatri S-1, Program Studi Ilmu Komunikasi S-1, dan Program Studi Ilmu Pemerintahan S-1 STPMD "APMD";
Ketiga : Segala Konsekuensi pembiayaan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STPMD "APMD";
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2016



Habib Muhsin, S.Sos, M.Si
NIIY 170 230 189

Lampiran 2.

Contoh : Format Halaman Judul Laporan Observasi dan Rencana Kegiatan KKN

L A P O R A N
OBSERVASI LOKASI DAN RENCANA KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
PERIODE ____ TAHUN AKADEMIK ____ / ____

L o g o
STPMD “APMD”

Diajukan Oleh :

Kelompok :
Dusun :
D e s a :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Kepada:

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

Lampiran 3.

Contoh: Halaman Pengesahan Laporan Observasi Dan Rencana Kegiatan KKN:

HALAMAN PENGESAHAN

Dalam rangka penyelesaian Tugas Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Tahun Akademik
____ / _____, kami :

No.	N a m a	No. Mhs.Prodi	Tanda Tangan
1.
2.
3.

dst.

Menyatakan telah melakukan observasi wilayah. Hasil observasi dan Rencana
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata selengkapnya kami uraikan berikut ini.

_____, _____ 20

Koordinator

Mengetahui,

Kepala Desa

Kepala Dusun

Menyetujui,

Kepala P3M

Dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 4.

Contoh Format Laporan Observasi dan Rencana Kegiatan KKN:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (jika ada)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berisi uraian tentang pemikiran atau alasan-alasan logis yang melatarbelakangi dilakukannya observasi lokasi.

B. Tujuan Observasi

Berisi butir-butir tujuan dari observasi, terutama yang relevan dengan tema dan tujuan KKN.

C. Pelaksanaan Observasi

Berisi uraian tentang bidang dan unsur yang diobservasi serta waktu, tempat, dan sasaran observasi.

D. Metode

1. Metode Pengumpulan Data

Berisi uraian tentang teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data tentang potensi-potensi maupun masalah-masalah atau kendala-kendala pembangunan yang ada di lokasi.

2. Metode Pelaksanaan Program Kegiatan

Berisi uraian tentang teknik yang direncanakan akan digunakan dalam melaksanakan program kegiatan beserta alasan-alasannya.

II. HASIL OBSERVASI DAN ANALISIS

A. Keberadaan Program Pembangunan

Berisi uraian tentang program-program pembangunan yang sudah ada di lokasi, pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan, dan bagaimana tingkat keberhasilan dari program-program tersebut.

B. Potensi Lokasi

Berisi uraian tentang potensi-potensi yang ada di lokasi KKN, baik potensi non-fisik, potensi fisik maupun potensi alam. Uraikan pula upaya-upaya apa saja yang dipandang strategis untuk mengembangkannya, dan sebutkan pihak-pihak (*stakeholders*) yang diperkirakan dapat dilibatkan dalam upaya pendayagunaan potensi-potensi tersebut.

C. Masalah dan Kendala

Berisi uraian tentang masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam upaya mengembangkan kehidupan masyarakat di lokasi KKN. Uraikan pula faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya masalah/kendala tersebut.

III. RENCANA KEGIATAN KKN

A. Rencana Kegiatan Kelompok

Berisi uraian tentang bidang kegiatan; materi kegiatan; tujuan atau hasil yang diharapkan; metode; sasaran; tempat; dan waktu kegiatan.

Uraiannya dibuat dengan susunan seperti berikut:

1. Bidang kegiatan: (misalnya: Ekonomi/Produksi)

- a) Materi kegiatan** : (misalnya: optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian).
- b) Tujuan** : (misalnya: mendorong terciptanya kesadaran kritis petani terhadap pemanfaatan lahan; peningkatan pendapatan petani; pelestarian/ konservasi lahan; dll)
- c) Masalah** : (Uraikan dengan rinci masalahnya apa, siapa yang mengalami masalah, dimana masalah itu ada, dll)
- d) Metode** : (misalnya: *Focus Group Discussion*)
- e) Sasaran** : (misalnya: kelompok tani)
- f) Peran mahasiswa** : (misal: peserta)
- g) Tempat** : (sebutkan tempat kegiatan akan dilaksanakan)
- h) Waktu** : (sebutkan hari, tanggal, dan jam)

2. dan seterusnya, seperti contoh di atas.....

B.Rencana Kegiatan Individual

Bagian ini berisi tentang Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan secara Individual. Cara menulis uraian kegiatannya sama dengan bagian (A).

(TAMBAHKAN LAMPIRAN: MATRIK IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH, dan MATRIK RENCANA KEGIATAN)

Lampiran 5.

Contoh Matrik Identifikasi Potensi dan Masalah

MATRIK IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH

Dusun : _____

No.	POTENSI			No	MASALAH		
	Bidang Potensi	Bentuk Potensi	Wilayah		Bidang Masalah	Bentuk Masalah	Wilayah
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
dst				Ds			

_____, _____ 20__

Menyetujui:

Kepala Desa

Kepala Dusun

Koordinator

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 6.

1. Contoh Matrik Rencana Kegiatan Kelompok:

MATRIK RENCANA KEGIATAN (KELOMPOK)

Dusun : _____

No.	Bidang Kegiatan	Metode dan Materi Kegiatan	Sasaran	Tempat	Tgl; Jam	Volume	Sumber dan Besar Dana (Rp)				
							Mhs	Masy.	Pemr	Lainnya	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_____, _____ 20__

Menyetujui:

Kepala Desa

Kepala Dusun

Koordinator

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan

2. Contoh Matrik Rencana Kegiatan Individual:

MATRIK RENCANA KEGIATAN (INDIVIDUAL)

Nama : _____

No. Mahasiswa : _____

Dusun : _____

No	Bidang Kegiatan	Metode dan Materi Kegiatan	Sasaran	Tempat	Tgl; Jam	Volume	Sumber dan Besar Dana (Rp)				
							Mhs	Masy.	Pemr.	Lainnya	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_____, _____ 20__

Mahasiswa

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Lapangan

Kepala Dusun

Lampiran 7.

Contoh Halaman Judul Laporan Akhir Pelaksanaan KKN:

LAPORAN PELAKSANAAN KKN

PERIODE _____ SEMESTER ____ TAHUN AKADEMIK 20____/20____

Logo
STPMD "APMD"

Diajukan Oleh :

Kelompok : _____
D u s u n : _____
D e s a : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Propinsi : _____

Kepada:

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

20____

Lampiran 8.

Contoh Halaman Pengesahan Laporan Akhir Pelaksanaan KKN

HALAMAN PENGESAHAN

Dalam rangka penyelesaian Tugas KKN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Tahun Akademik 20__/20___, kami :

No.	NAMA MAHASISWA	NO. MHS.	PRODI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
Dst.				

Menyatakan telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Laporan selengkapnya sebagaimana berikut ini.

_____, _____ 20__

Koordinator

Mengetahui,

Kepala Desa

Kepala Dusun

Menyetujui,

Kepala P3M

Dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 9.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KKN

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berisi uraian tentang pentingnya dilaksanakan KKN, baik untuk kepentingan masyarakat, mahasiswa, Perguruan Tinggi (STPMD “APMD”) dan Pemerintah.

B. Pelaksanaan Observasi

Uraian sasaran atau obyek observasi beserta metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan observasi dan jelaskan alasan menggunakan metode tersebut. Uraikan pula waktu, tempat dan subyek yang terlibat dalam observasi.

C. Hasil Observasi dan Analisis

1. Program kegiatan masyarakat yang telah ada di lokasi

Uraikan program-program kegiatan masyarakat yang telah ada di lokasi KKN, baik yang dapat berjalan dengan lancar, maupun yang mengalami permasalahan

2. Masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat

Uraikan masalah-masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan temuan dalam observasi.

3. Potensi Lokal yang tersedia

Uraikan potensi lokal yang ditemukan melalui observasi, khususnya potensi lokal yang perlu didaya gunakan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

D.Rencana Kegiatan

Pada bagian ini berisi uraian tentang rencana kegiatan yang disepakati bersama masyarakat. Diskripsikan semua rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama masyarakat. Jelaskan pula relevansi dari setiap kegiatan tersebut, terhadap masalah atau kebutuhan yang teridentifikasi.

BAB II

DESKRIPSI KEADAAN UMUM LOKASI KKN

DESKRIPSIKAN KEADAAN:

- A. Geografis
- B. Demografi
- C. Sosial ekonomi
- D. Budaya
- E. Pemerintahan
- F. DII.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

A.REALISASI KEGIATAN KKN

Pelaksanaan kegiatan KKN yang perlu dilaporkan meliputi:

Laporan pelaksanaan kegiatan KKN diawali dengan menguraikan ketepatan mahasiswa dalam perencanaan kegiatan dibandingkan dengan pelaksanaannya (diuraikan tentang program-program yang tidak dapat dilaksanakan dan juga penambahan atau penggantian program disertai dengan alasannya).

i. Kegiatan Kelompok

Bagian ini dibuat secara kelompok.

Berisi uraian dan pembahasan tentang bidang kegiatan; bentuk masalah yang dihadapi; potensi yang tersedia; materi kegiatan; tujuan atau hasil kegiatan yang

diharapkan; metode pelaksanaan kegiatan; sasaran; tempat; waktu kegiatan; dan besarnya dana setiap kegiatan, serta sumbernya.

ii. Kegiatan individu

Bagian ini dibuat secara individual (perorangan).

Berisi uraian dan pembahasan tentang bidang kegiatan; bentuk masalah yang dihadapi; potensi yang tersedia; materi kegiatan; tujuan atau hasil kegiatan yang diharapkan; metode pelaksanaan kegiatan; sasaran; tempat; waktu kegiatan; dan besarnya dana setiap kegiatan, serta sumbernya.

B. EVALUASI KEGIATAN KKN

Uraikan tentang tingkat keberhasilan masing-masing kegiatan beserta kendala-kendalanya.

BAB IV PENUTUP

- A. 1. Pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti KKN
- 2. Memaparkan isu-isu strategis yang ditemukan di lokasi KKN
- B. Saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Matrik Realisasi Kegiatan KKN.
 - a. Matrik Kegiatan Kelompok.
 - b. Matrik Kegiatan Individual.
- 2. Foto-foto Kegiatan KKN.
- 3. Kuitansi-kuitansi dan atau bukti-bukti pengeluaran uang.
- 4. Lampiran lain yang dipandang perlu.

Lampiran 10.

1. Contoh Matrik Realisasi Kegiatan Kelompok:

MATRIK REALISASI KEGIATAN KELOMPOK

Dusun : _____

No	Bidang Kegiatan	Metode dan Materi Kegiatan	Jumlah peserta (masy.	Peran Mhs	Lama Waktu (jam/menit)	Volume	Sumber dan Besar Dana (Rp)					
							Mhs	Masy.	Pemr.	Lainnya	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

_____, _____ 20__

Menyetujui:

Kepala Desa

Kepala Dusun

Koordinator

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan

2. Contoh Matrik Realisasi Kegiatan Individual:

MATRIK REALISASI KEGIATAN INDIVIDUAL

Nama : _____

No. Mahasiswa : _____

Dusun : _____

No	Bidang Kegiatan	Metode dan Materi Kegiatan	Jumlah Peserta	Peran Mhs	Lama waktu	Volume	Sumber dan Besar Dana (Rp)				
							Mhs.	Masy.	Pemr.	Lainnya	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_____, _____ 20_____

Mahasiswa

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Lapangan

Kepala Dusun
